

Marginalisasi Kepentingan Kelas dan Demokrasi di Indonesia¹

Olle Törnquist

MENINGGAT kenyataan bahwa demokrasi bukan sekadar mengenai prosedur tetapi juga mengenai kekuasaan politik yang setara menyangkut urusan publik, mengapa hanya ada sedikit sekali aktor-aktor penting yang pernah mencoba memajukan pembangunan sosial-ekonomi berdasarkan kepentingan kelas yang berbeda-beda melalui jalan demokratisasi? Pertanyaan ini sangat valid khususnya untuk Indonesia, yang pada 1950an pernah memiliki gerakan kerakyatan terbesar di dunia dan yang pada 1990an juga telah bekerja untuk melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Suharto. Mengapa ada kekurangan yang sangat mencolok mata menyangkut (pemajuan) kepentingan kelas dalam demokrasi, bahkan di sebagian besar kalangan yang disebut Kiri? Agar menjadi lebih jelas, ada tiga pertanyaan penuh teka-teki yang akan memandu keseluruhan tulisan ini.

Pertama mengapa PKI, gerakan komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina ketika itu, menyerah terhadap demokratisasi dan malah berlindung di belakang Presiden Soekarno yang semakin otoriter padahal ia mengalami kemajuan sangat pesat berkat kebebasan dan pemilihan umum, berkat demokrasi? *Kedua*, mengapa oposisi terhadap akumulasi kapital yang secara politik difasilitasi oleh Suharto tidak

¹ Judul asli tulisan ini adalah "The Indonesian Marginalisation of Class Interest and Democracy," ditulis khusus oleh pengarangnya untuk bab ini. Diterjemahkan oleh AE Priyono.

dilanjutkan dengan reformasi demokratis atas negara tetapi malah privatisasi yang ekstensif dan lokalisasi politik? Yang *ketiga*, mengapa gerakan demokrasi tidak sungguh-sungguh berpihak pada politik massa demokratis maupun politik pembangunan kesejahteraan? Akhirnya ketiga pertanyaan itu akan bermuara ke pertanyaan berikutnya, bagaimana kita meniti masa depan?

Mengapa Demokrasi Disingkirkan?

Jawaban atas teka-teki pertama bisa ditelusuri dalam pemikiran liberal dan Marxis mengenai modernisasi dan demokrasi maupun dalam teori Marxis mengenai akumulasi (kapital) primitif. Demokratisasi Indonesia tumbuh dari perjuangan melawan imperialisme, rasisme, dan pemerintahan tak langsung yang dijalankan oleh para orang-kuat (*strongmen*) lokal. Pada mulanya, kelompok-kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan hanya diwakili oleh kaum elite dalam sistem liberal parlementer; ada periode represi anti-komunis; dan banyak minoritas kosmopolitan dari Asia dan Eropa yang harus dienyahkan. Masalah utamanya adalah korupsi, politik kepartaian yang elitis, mobilisasi politik klientelistik yang berkombinasi dengan jaringan keagamaan dan kesukuan. Satu-satunya partai massa modern yang berbasis kelas didirikan oleh para komunis muda yang memilih agenda reformis setelah 1951. Ada juga usaha-usaha penting untuk perjuangan kesetaraan warga negara, *rule of law* dan penegakan keadilan, kebebasan dan hak-hak, serta perluasan pendidikan dasar dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ada pemilu nasional pertama pada 1955 yang dilanjutkan dengan pemilu daerah pada 1957. Ironisnya, meski hanya terjadi sedikit ketidakberesan dalam pemilu-pemilu itu, tetapi hasil akhirnya adalah sebuah kegagalan bagi kaum sosialis elitis yang berorientasi-Barat; ada saling-kunci antara kaum nasionalis dan kaum Muslim berhaluan tradisional dan modern; dan mereka semua ketakutan bahwa PKI yang cukup berhasil bakal memenangkan dukungan lebih banyak suara sehingga mereka memprovokasi Presiden Soekarno dan para petinggi tentara untuk membubarkannya sebelum berkemungkinan menang menjadi penguasa. Hebatnya, hampir semua akhirnya sepakat bahwa

demokrasi dianggap terlalu dini dan bahwa syarat-syaratnya harus ditetapkan di depan (Bourchier dan Legge 1994).

Di satu pihak, kaum liberal, sosialis, dan kalangan Muslim modernis mendukung pembangunan berorientasi pasar, *rule of law*, serta sepele-angkat hak-hak dan kebebasan tertentu—bukannya kedaulatan rakyat—serta terlibat dalam upaya kudeta dan protes-protes daerah. Di pihak lain, Presiden Soekarno bersama kaum nasionalis, kaum komunis, maupun kalangan Muslim tradisional dan para pejabat lebih memilih untuk menganjurkan negara kesatuan dan mendesak agar para pembangkang (daerah) itu diperlakukan sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional serta mengkampanyekan “pembebasan” Irian Barat, memprovokasi nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda, merancang *land-reform*, dan menganjurkan “Demokrasi Terpimpin.” Parlemen dibubarkan dan dibentuk yang baru (melalui pengangkatan); pemilihan umum ditunda dan partai-partai oposisi (PSI dan Masjumi) dilikuidasi; konstitusi lama (yang lebih menyukai Presiden yang kuat) diberlakukan lagi, sementara peraturan-peraturan tentang situasi darurat negara membuat tentara makin memiliki kekuasaan menentukan.

Para pembangkang dengan sia-sia berusaha merespon keadaan itu dengan mengobarkan pemberontakan dari “luar Jawa”—setelah mana para pendukungnya dari negara-negara Barat mengubah kebijakan dengan berbalik mengajak pejabat-pejabat anti-komunis untuk memerangi pemberontak. Strategi baru ini segera saja bisa dirangkum dalam gagasan Samuel Huntington tentang perlunya *rule of law*, lembaga-lembaga kenegaraan yang kuat, serta ‘politik ketertiban’ mendahului kedaulatan rakyat (Huntington 1965). Langkah-langkah itu di-susul dengan dukungan besar-besaran kepada para pejabat militer, beasiswa pendidikan Barat kepada para ekonom, para administrator dan kerabat para pejabat, melalui kerjasama program studi kawasan yang berbasis di universitas-universitas Amerika dengan dukungan Ford Foundation. Yang terjadi kemudian, perspektif “politik ketertiban” itu memberi legitimasi untuk pembunuhan massal kaum komunis oleh Suharto, kudeta terhadap Soekarno, dan tiga dekade otoritarianisme Orde Baru.

Kendati demikian, pada awal 1960an, kaum komunis dan Presiden Soekarno masih memimpin gerakan kerakyatan terbesar di dunia itu, meskipun situasi akhirnya berubah secara radikal pada pertengahan kedua 1965. Penindasan dan pembantaian terhadap golongan komunis di Indonesia mengingatkan pogrom yang dilakukan Stalin pada akhir 1930an, karena kemiripan karakter dan besarnya jumlah korban. Tetapi pogrom yang dilakukan di Indonesia jelaslah dilakukan kaum kanan, karena itu gerakan kerakyatan komunis tidak bisa disalahkan untuk pembasmian ini. Pertanyaannya, bagaimana mungkin penindasan dan penggunaan kekerasan yang luar biasa terhadap kaum komunis itu terjadi?

Meski menjadi gerakan massa yang besar untuk transformasi radikal, sudah sejak 1957 PKI tidak berusaha mendukung perjuangan demokratisasi. Gerakan komunis itu mengesampingkan perjuangan untuk kebebasan dan pemilu, malah lebih memilih menjadi sayap militernya Soekarno untuk mendukung “Demokrasi Terpimpin,” dengan meyakini bahwa *land reform* dan nasionalisme radikal adalah prasyarat bagi demokrasi yang sejati. Akhirnya partai ini benar-benar tidak bisa kembali ke strategi elektoral ketika para pejabat militer yang berada di balik “Demokrasi Terpimpin,” khususnya sejak 1960, mulai menentang gerakan kerakyatan yang didominasi PKI (Törnquist 1984). Sebaliknya, segelintir pemimpin partai terlibat dalam petualangan nekat yang disebut Gerakan 30 September (G30S) yang dilakukan oleh para desiden dan aktivis politik untuk membat para petinggi militer anti-komunis. Bagian ini menjadi preteks (dalih) untuk dilakukannya represi dan pembunuhan massal di bawah kendali tentara di seluruh penjuru negeri, didukung oleh kekuatan-kekuatan Barat (Roosa 2006).

Tetapi sesungguhnya ada problem yang jauh lebih fundamental. Gagasan tentang pembangunan nasional dengan mana negara mendukung pakta antara petani, buruh, dan kaum “borjuasi nasional” untuk *land reform* dan anti imperialisme yang dimaksudkan untuk menciptakan prakondisi bagi demokrasi, justru berjalan secara berlawanan—ia malah melahirkan akumulasi kapital secara otoritarian (Törnquist 1984). Aktor-aktor berorientasi wiraswasta seringkali sangat dekat dengan Barat dan sangat anti-komunis, sementara kaum nasionalis

yang banyak berkicau tentang anti-imperialisme dan pada saat itu bahkan tentang *land reform* dan partisipasi kerakyatan, sangat tidak berorientasi produksi serta menggunakan politik radikal dan kekuasaan administratifnya untuk memperkaya diri. Pada akhir 1950an, PKI memasukkan para politisi nasionalis, birokrat, dan pejabat militer progresif ke dalam negara dan politik untuk membangun koalisi demi apa yang oleh Moscow disebut sebagai “pembangunan non-kapitalis.” Tapi ini semua menjadi memburuk karena aktor-aktor ini pada dasarnya menggunakan isu nasionalisasi radikal—dalam rangka memonopolisasi kontrol atas regulasi negara, aset-aset, kredit, investasi, harga dan pekerjaan, maupun para pekerja dan serikat buruh—untuk akumulasi kapital dan apropriasi surplus ekonomi.

Problem-problem yang bisa diantisipasi dari dinamika seperti itu sangat berkaitan dengan model yang ditemukan Marx di Inggris tentang munculnya kapitalisme privat, menurut mana akumulasi primitif hanya merujuk pada apropriasi tanah dan alat-alat produksi lain milik kalangan petani dan golongan tukang (*artisans*) oleh para tuan tanah berorientasi komersial dan aktor-aktor privat lain yang didukung negara. Alat produksi basis berkembang menjadi kapital (yang bisa diinvestasikan) dan buruh berkembang menjadi komoditi (yang bisa diperas), yang kesemuanya memungkinkan terjadinya eksploitasi kapitalis dan akumulasi kapital. Kendati demikian, ini adalah kerangka analisis yang tidak mencukupi untuk konteks pasca kolonial. Dalam konteks pasca kolonial, aktor-aktor dominan yang mendapatkan dukungan kolonialisme terlalu lemah untuk merampas sebagian besar penduduk dari tanah mereka dan alat-alat produksi mereka dengan cara yang sama-sama memaksa. Kendati demikian mereka mampu menggunakan politik, negara, dan daya-paksa militer untuk mendapatkan kontrol tak langsung atas sumber daya alam, tanah, dan bisnis kecil (dan karena itu juga banyak surplus yang diproduksi di sektor-sektor ini), begitu juga untuk menasionalisasi atau mengambil untung dari perusahaan-perusahaan milik asing, di samping mendapatkan bantuan asing. Singkatnya mereka mampu melakukan akumulasi politik dari kapital orisinal, yang kemudian menjadi basis bagi kapitalisme.

Berkaitan dengan hubungan-hubungan kelas di sektor pertanian, benar bahwa riset yang dilakukan PKI pada akhir 1950an dan awal 1960an mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi yang lebih rumit jika dibandingkan dengan model Eropa, sehingga muncul rumusan tentang adanya “tujuh setan desa.” Di sektor ekonomi lainnya, para pemimpin partai menggunakan konsep Cina tentang para “kabir” (kapitalis-birokrat) untuk menggambarkan musuh-musuh baru mereka. Tapi partai tak pernah mengakui bahwa basis utama lawan mereka ada di dalam kontrolnya atas politik, negara, dan praktek koersif lebih ketimbang dalam jaringan-jaringan para tuan tanah dan kaum imperialis di mana PKI terus menganggapnya sebagai musuh utama dan karena itu berusaha memperlemahnya dengan cara mendukung agenda *land reform*, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, dan umumnya provokasi nasionalisme radikal.

Konsekuensinya menjadi sangat merusak. Kelompok “borjuasi nasional” dan pemimpin-pemimpin negara yang diduga progresif ternyata tidak bertindak seperti yang diharapkan. Ada investasi meskipun kecil dan pertumbuhan yang cukup dinamis. PKI mampu mengendalikan aktivisme buruh yang militan dalam rangka membangun pakta sosial dengan “borjuasi nasional” dan para pemimpin yang dianggap progresif serta kepentingan-kepentingan bisnis mereka. Hasilnya adalah salah-urus ekonomi yang parah dan krisis. Protes terhadap penjarahan dan korupsi berakibat pada bertambahnya represi. Kaum komunis tidak bisa membalas balik represi itu karena itu akan berarti hilangnya dukungan dari Soekarno. Rakyat dimobilisasi untuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan untuk mendukung kebijakan-kebijakan anti-imperialis dengan tujuan melemahkan kekuatan para “kabir” karena kekuasaan mereka didasarkan pada modal asing dan jaringan-jaringan kepentingan Barat. Tetapi para pemimpin militer terus memperluas kontrol mereka baik terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah dinasionalisasi maupun terhadap sumber-sumber ekonomi negara pada umumnya. Meskipun konteks pedesaan jauh lebih ruwet, ada tanah-tanah yang bisa dirampas dan dibagi-bagi, dan sedikit tuan-tanah besar yang siap berperang. Maka, ketika mencoba menandai dan membagi-bagi “tanah-surplus,” sulit untuk menghindarkan terjadinya gesekan

antara para pemilik tanah kecil, penggarap, dan buruh. Semua ini berkaitan dengan cara-cara eksploitasi yang lebih tidak langsung oleh orang-kuat lokal yang berhasil mendapatkan kekuasaan keagamaan, sosial, politik dan administratif dan dengan demikian juga mendominasi produksi dan perdagangan, sambil juga menyediakan patronase misalnya untuk berkompetisi dengan organisasi-organisasi yang dipimpin kalangan komunis.

Setelah itu, sebagai bagian dari pembasmian atas gerakan massa di bawah kepemimpinan Suharto, penghisapan surplus melalui cara-cara politik dan administratif menjadi lebih nyata, mengalami pembrutalan, dan digunakan untuk perampasan dan penguasaan tanah. Itu sebabnya pada akhir 1970an dan awal 1980an, musuh utama kaum miskin pedesaan dipersepsi sebagai negara itu sendiri serta mereka yang dianggap berkuasa lebih ketimbang para tuan tanah dan orang-orang kuat dengan basis di produksi swasta berorientasi pasar (Törnquist 1984a).

Singkatnya, politik demokratik transformatif mengalami pelemahan baik karena kebebasan dan pemilihan umum telah dikesampingkan, maupun—yang lebih fundamental lagi—karena pakta sosial demi kepentingan *land reform* dan anti-imperialisme yang dikendalikan-negara telah dibajak oleh kaum nasionalis dan militer sebagai sarana politik untuk akumulasi kapital. Gerakan berbasis massa dan partai-partai politik tidak mampu melawannya karena mereka telah membuang perlengkapan demokratik guna melawan musuh-musuh baru mereka.

Mengapa Para Pembangkang Tidak Mendemokratisasikan Negara?

Ini membawa kita pada teka-teki kedua. Pada akhir 1980an banyak analis dan aktor yang telah berdebat sejak 1950an bahwa demokrasi masih prematur mulai membuktikan kesalahannya. Tuntutan akan hak-hak dan kebebasan demokratik serta pembaruan atas lembaga-lembaga politik yang telah banyak disalahgunakan menjadi hal-hal yang semakin penting dalam banyak agenda politik. Ini berpuncak pada jatuhnya Suharto di tahun 1998 serta meningkatkan perdamaian dan rekonstruksi di provinsi Aceh yang penuh gejolak tujuh tahun kemudian. Maka bagaimana bisa perjuangan demokrasi yang telah melahirkan kebebasan

individual dan privatisasi tidak menghasilkan demokratisasi ekstensif dan substansial untuk pembaruan negara dan politik?

Benar bahwa Indonesia dewasa ini dicirikan sebagai kasus yang berhasil dalam usaha rekayasa demokrasi (Aspinall 2010). Negeri ini telah menjadi negeri yang paling liberal di Asia Tenggara. Papua tetap menjadi masalah tetapi Timor Timur telah memperoleh kemerdekaan dan perang saudara di Aceh berhasil diselesaikan dengan masuknya pejuang kemerdekaan ke pemerintahan daerah yang dijalankan secara otonom. Korupsi tetap menggila tetapi terus dikecam secara makin meluas; dan peranan politik militer betul-betul telah dikurangi secara sangat signifikan. Ekonomi juga berjalan baik berkat ekspor bahan mentah dan konsumsi yang makin meningkat di kalangan kelas menengah.

Meski demikian, banyak analis beranggapan bahwa fundamental-fundamentalnya bermasalah. Sebagian mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi bohong-bohongan karena lebih merupakan oligarki yang berbasis pada elite lama warisan Suharto, yang kini memerintah melalui pemilu-pemilu demokratik dan di mana mereka menggunakan begitu banyak sumber kekuasaan untuk memenangkan suara mayoritas (Robison dan Hadiz 2004). Yang lain mengatakan ada kombinasi antara kebebasan dan pemilihan umum serta dominasi sebuah aliansi elite (misalnya Priyono et al. 2007; Nordholt dan van Klinken 2007, Samadhi dan Warouw 2009; van Klinken 2009).

Kebebasan-kebebasan vital dan elemen-elemen prosedural demokrasi dimungkinkan karena pemerintahan politik yang mengatur urusan publik secara sentralistik, termasuk peluang-peluang bisnis, kini telah digantikan oleh desentralisasi, privatisasi, dan pendelegasian ke lembaga-lembaga non-pemerintah. Para pejabat eksekutif terpilih, anggota DPR, para kapitalis swasta dan pemuka-pemuka NGO mengambil alih mereka yang di masa lalu hanya diangkat oleh para penguasa. Dan sementara hanya ada sedikit tempat perlindungan yang aman bagi para oligark lama, mereka mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk membangun aliansi-aliansi baru dengan mantan politisi pembangkang, pelaku-pelaku bisnis, dan para para tokoh sosial. Kalangan elite dominan di bawah Suharto, tetapi juga aktor-aktor berpengaruh dari masa lalu yang mendapatkan peluang hidup baru setelah 1998

berkat sumber-sumber ekonomi, serta jaringan dan kontrol media, kini bahkan mulai memonopoli kembali institusi-institusi pemerintahan. Sistem representasi korporatis dari-atas-ke-bawah ala Suharto memang telah lenyap tetapi kini belum ada alternatifnya yang lebih demokratis; yang ada hanyalah politik kelompok penekan, politik lobi, dan kampanye media yang memerlukan jaringan pertemanan (*good-contacts*) serta akses ke sumber-sumber dana. Seperti di banyak negara lain, demokratisasi Indonesia menjadi niscaya justru karena urusan-urusan publik telah didepolitikasi (c.f. Harriss et al. 2004 dan Törnquist et al. 2009).

Tetapi mengapa tidak ada aktor alternatif yang tertarik pada, dan mampu untuk, mobilisasi sebuah stratum kekuatan populer yang lebih luas di atas platform demokratik yang konsisten? Inilah teka-teki ketiganya.

Mengapa Gerakan Demokrasi Tidak Berkiprah dalam Politik Kelas?

Gerakan demokrasi dibentuk dari tiga arus kecenderungan utama (a.l. Törnquist 1997; Aspinall 2005; Lane 2008). Yang pertama dibangun oleh kalangan intelektual yang berorientasi liberal dan sosialis serta kelompok-kelompok mahasiswa yang sangat kritis terhadap otoritarianisme Soekarno dan nasionalisme radikal PKI. Beberapa di antaranya bahkan didukung tentara pada 1965 sebelum mereka akhirnya menyadari bahwa kudeta Suharto melibatkan pembunuhan massal dan bahwa militer lah, lebih ketimbang teknokrat dan intelektual kelas menengah, yang menjadi pengemudi politik. Arus kecenderungan kedua berasal serikat-serikat buruh non-komunis dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memfokuskan diri pada isu petani dan kaum miskin kota. Arus ketiga dimiliki oleh suatu generasi kelompok masyarakat sipil yang sangat meminati "pembangunan alternatif," sering memfokuskan perhatian pada isu lingkungan, hak asasi, dan korupsi.

Kendati demikian, semua pembangkang itu setuju bahwa negara otoritarian adalah kendala utama dan bahwa "masyarakat sipil" adalah basis alternatif. Perbedaan-perbedaan kelas tidaklah berada di latar depan dan kelompok-kelompok baru tidak didasarkan pada keanggotaan

ekstensif maupun organisasi berskala nasional di luar kota-kota besar, serta lebih berfungsi sebagai jejaring pengaruh. Fokusnya adalah pada isu-isu, hak-hak, dan problem-problem spesifik. Kelompok-kelompok mahasiswa berorientasi kiri mencoba menggantikan pendekatan ini, dengan menganggap bahwa perbaikan substantif memerlukan perubahan rezim. Ini menuntut kepemimpinan politik dan jalinan yang lebih rapat antara kelompok-kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan masyarakat banyak. Posisi radikal ini diterima cukup luas tetapi tidak ada kesepakatan bagaimana bergerak maju. Ada koalisi-koalisi kontemporer, tetapi sebagian besar dari kelompok-kelompok itu sibuk dengan proyeknya sendiri melawan rezim dan masing-masing menyimpan kecurigaan satu sama lain. Sementara itu, para aktivis lainnya berusaha menjangkau masyarakat luas melalui jaringan organisasi-organisasi sosial keagamaan.

Singkatnya ada “gerakan demokrasi” dalam pengertian bahwa kelompok-kelompok itu setuju mengenai perubahan politik dan demokratisasi. Namun tidak ada kesatuan ideologis maupun koordinasi pada level nasional, dan hampir tidak ada usaha untuk membentuk front-front kesatuan maupun partai-partai. Sementara menyadari pentingnya meruntuhkan legitimasi rezim, gerakan itu berdiri di atas ketiadaan alternatif yang koheren. Klaim utamanya adalah bahwa “masyarakat sipil” dan rakyatlah yang seharusnya menjalankan negara. Karena gerakan ini gagal membangun perangkat transisional alternatif dan jeratan pemilu yang elitis telah membuat para aktivisnya kehilangan momentum, mereka akhirnya hanya menjadi kelompok yang secara sosial dan politik termarginalisasi (Törnquist 2000; Prasetyo et al. 2003).

Alasan utama mengapa kelompok-kelompok pro-demokrasi itu tidak mampu menciptakan alternatif dan mengembangkan strategi transformatif adalah semata-mata karena bagi setiap aktor yang terlibat, tidak ada alasan yang kuat untuk melakukannya (Budiman dan Törnquist 2001; Prasetyo et al. 2003; Priyono et al. 2007; Samadhi and Warouw 2009). Secara tipikal, para aktor pro-demokrasi hanya berhubungan dengan bagian-bagian khusus penduduk, jarang menyediakan jaringan, misalnya, antara kegiatan-kegiatan di tempat kerja, di wilayah

tempat tinggal, dan di komunitas. Para aktivis itu hanya bergulat di lokalitas-lokalitas khusus, sedikit memberikan perhatian pada isu-isu yang luas mengenai pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan publik. Ada banyak fokus tentang *rule of law*, hak asasi manusia, korupsi, dan kontrol sipil atas militer; tetapi sangat kurang mengenai kewarganegaraan, dan hampir tidak ada mengenai representasi dan kapasitas pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Para aktivis sangat jarang mencoba memobilisasi pengikut-pengikutnya untuk masuk ke wilayah isu administrasi publik dan untuk berkiprah dalam politik yang terorganisasi (*organised politics*); mereka juga tidak hadir di tempat-tempat kerja publik dan privat.

Prestasi terbesar mereka adalah mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, berkiprah dalam kegiatan-kegiatan lobi dan sebagai kelompok penekan, serta dalam memajukan kegiatan-kegiatan swakelola (*self-management*) dan swadaya (*self-help*). Otoritas dan legitimasi mereka berkaitan erat dengan privilese pengetahuan yang mereka miliki dan partisipasi mereka dalam pembentukan diskursus publik; tetapi itu dengan mengorbankan kebutuhan pengorganisasian massa untuk memperoleh mandat publik dan memenangkan pemilu. Mereka juga tidak memiliki koneksi yang bagus dengan gerakan sosial dan organisasi-organisasi kerakyatan (begitu pula sebaliknya). Aksi-aksi kolektif terutama didasarkan pada jaringan individual dan patronase alternatif, yang itu sama sekali berbeda dengan partisipasi dalam organisasi-organisasi representatif berbasis isu-yang-diperluas. Parlemen dan lembaga-lembaga eksekutif terutama didekati melalui lobi oleh NGO dan kritik media. Karena isu-isu yang diprioritaskan, strategi ini memang efektif, setidaknya untuk jangka pendek. Tapi untuk kebutuhan jangka panjang, perhatian harus lebih dicurahkan pada upaya untuk membangun politik massa, partai-partai politik yang memadai, atau organisasi-organisasi yang berbasis kepentingan-yang-diperluas.

Betapapun, itu adalah prestasi besar dibandingkan dengan periode Suharto ketika politik yang terorganisasi (kecuali partai pemerintah) dilarang aktif di tingkat akar rumput dalam rangka menjadikan rakyat pada umumnya sebagai “massa mengambang.” Setelah era Suharto, aktivis-aktivis pro-demokrasi itu sendiri yang akhirnya “mengambang,”

setelah gagal membangun konstituen sosial yang solid. Mereka tak mampu menciptakan perbaikan-perbaikan substansial menyangkut kontrol kerakyatan terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik. Dalam banyak hal mereka bahkan menyumbang terjadinya lebih banyak privatisasi dan polisentrisme. Tidak jelas rakyat (*demos*) seperti apa yang akan mengontrol urusan publik yang mana. Di samping itu, kelompok-kelompok aktivis pro-demokrasi itu sering dimarginalisasi atau dikooptasi oleh aktor-aktor yang lebih berpengaruh dalam politik, pemerintahan, dan bisnis, maupun oleh organisasi-organisasi dan donor-donor internasional.

Di hadapan kelemahan-kelemahan demikian, banyak aktivis mencoba mengembangkan cara-cara baru untuk terlibat dalam politik terorganisasi (Törnquist et al. 2009a), yakni untuk “go politics.” Beberapa di antaranya berusaha mengembangkan demokrasi melalui kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok penduduk-asli, dan jamaah-jamaah Muslim atas dasar kesetaraan warga negara. Yang lain melakukan upaya-upaya *bypass* terhadap “politisi busuk” dengan membangun “politik langsung” untuk mengembangkan diskusi publik, audit sosial, perjuangan melawan korupsi dan *participatory budgeting* demi lahirnya kebijakan-kebijakan “pro-kaum-miskin” yang belum terlalu jelas. Proyek-proyek dampingan juga dikerjakan antara lain mencakup fasilitasi serikat buruh atau untuk membangun politik dan partai berbasis gerakan sosial. Strategi yang sangat populer juga dikerjakan, yaitu menegosiasikan kontrak-kontrak politik dengan aktor-aktor politik yang kuat yang merasa perlu memperluas aliansi dan basis dukungan mereka di luar kerangka klientelistik.

Semua strategi ini mencerminkan prioritas-prioritas yang ada dan praktek-praktek organisasional di kalangan para aktor pro-demokrasi, yang tujuan-tujuannya—bukan politiknya—telah domodifikasi. Fokus utamanya masih pada masalah-masalah yang berkaitan dengan isu utama organisasi atau gerakan mereka, lebih ketimbang pada isu-isu yang lebih luas yang menuntut aliansi yang diperluas dan politik massa. Dan ketika mengupayakan kerjasama, para aktivis itu menghadapi problem tentang representasi politik yang buruk, baik di dalam kelompok dan organisasi mereka sendiri maupun dalam hubungannya dengan

partai politik, parlemen, dan lembaga-lembaga negara. Secara tipikal ini bahkan semakin mengaburkan kelompok rakyat (*demos*) mana yang diandaikan mengontrol urusan publik apa.

Para aktivis lain berusaha membangun gugus-gugus depan politik dari dalam sebuah partai atau gerakan politik yang berpengaruh, untuk mengubahnya menjadi instrumen perubahan. Problem utamanya adalah risiko dikooptasi dan kebutuhan untuk membangun kekuatan yang cukup berpengaruh bahkan ketika tidak mungkin membentuk faksi terbuka di dalam sebuah partai atau gerakan. Sementara itu, mereka yang membangun partainya sendiri berdasarkan sebuah ideologi nasional untuk memberikan panduan dan koordinasi politik bagi banyak kelompok demokrasi dikenal sebagai pembaca-pembaca rakus literatur radikal—karya-karya Marx, Lenin, Mao—dan dengan itu bermimpi seolah-olah telah mewakili organisasi masyarakat sipil dan gerakan populer yang luas—padahal sesungguhnya semua itu belum ada.

Satu-satunya proyek politik yang pada awalnya menciptakan perbedaan penting adalah memperjuangkan legalisasi partai-partai lokal dan calon-calon independen dalam pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh. Penting untuk dicatat, para pemimpin dan aktivis yang terlibat dalam proyek ini telah menjalankannya sesuai dengan kesepakatan damai yang diterima luas dalam Perjanjian Helsinki, dan berdasarkan itu kemudian membangun aliansi serta memenangkan pemilihan kepala daerah pada 2006—meskipun tetap ada perlawanan dari para petinggi GAM semi-aristokratik di pengasingan dan kebanyakan politisi Indonesia. Dengan demikian, menjadi mungkin untuk memimpikan institusi-institusi baru seperti yang dikerjakan di Aceh itu sebagai model bagi seluruh kawasan negara maupun bagi daerah-daerah konflik lainnya. Kemajuan-kemajuan ini, kendati demikian, dengan cepat mengalami pemburukan. Komunitas internasional sibuk dengan pekerjaan rekonstruksi pasca-tsunami, dan hanya sedikit upaya dikerjakan untuk menjalankan program demi mendukung perbaikan pemerintahan. Ini membantu para pemimpin semi-aristokratik dan orang-kuat lokal yang memiliki akses ke struktur komando GAM dan yang akhirnya menjadi dominan, untuk memperluas kesepakatan-kesepakatan berbagi-kuasa dengan bekas musuh-musuh mereka di Jakarta, dengan

mengenyahkan kalangan reformis. Lebih dari itu, para reformis sendiri tidak cukup berhasil menggunakan posisi mereka untuk memenangkan pemilu-kada dan memajukan representasi berbasis-kepentingan serta memulai langkah-langkah pembangunan alternatif demi pemajuan kesejahteraan. Dengan demikian, sebagian besar aktor (tak peduli reformis atau bukan) kembali mempraktekkan lobi, klientelisme dan korupsi, dalam upaya untuk mempertahankan posisi mereka (Törnquist et al. 2011, Törnquist 2013).

Menapak Jalan ke Masa Depan

Kesimpulannya, Indonesia telah jauh melintasi masa akhir 1950an dan awal 1960an di mana terjadi pemisahan antara politik massa berbasis kepentingan (kelas) dan demokratisasi, menuju pengakuan pada akhir 1980an dan seterusnya bahwa demokratisasi sungguh penting dan primer—meskipun dewasa ini kalangan pro-demokrasi ditantang oleh polisentrisme, kebebasan-kebebasan individual, dan privatisasi; pun pula terdiskoneksi dari politik massa berbasis kepentingan kelas. Adakah cara yang realistis untuk menanggulangi kontradiksi-kontradiksi antara demokrasi dan pembangunan sosial-ekonomi?

“Kisah Indonesia” memberikan enam pelajaran penting dalam konteks lain juga. *Pertama*, kejatuhan Indonesia ke dalam otoritarianisme pada 1960an memberi kesaksian tentang gagalnya inkorporasi lebih ketimbang integrasi rakyat ke dalam politik, termasuk di bagian yang dikerjakan beberapa aktor liberal dan sosialis berorientasi kiri. Ini tetap menjadi keprihatinan umum di banyak negara yang telah mengalami depolitisasi dan transisi neoliberal menuju demokrasi liberal selama puluhan tahun terakhir ini (Harriss et al. 2004; Törnquist et al. 2009; Törnquist 2013a).

Kedua, pengalaman-pengalaman historis di Indonesia menunjuk pada problem terkait, yaitu bahwa banyak aktor berpengaruh telah dan masih memberikan prioritas pada lembaga-lembaga pemerintahan yang diandaikan stabil sebagai lebih penting ketimbang kedaulatan rakyat. Posisi ini, yang begitu berpengaruh dalam diskursus politik dan akademis pada 1960an, kembali mengemuka melalui perdebatan tentang pentahap-tahapan pembaruan kelembagaan (*sequencing of*

institutional reforms) untuk [penguatan] *rule of law* dan representasi populer demokratik dalam transisi menuju demokrasi (Huntington 1965; Carothers 2007). Dewasa ini padangan seperti ini digunakan oleh para pemimpin di Beijing dan Hanoi juga.

Ketiga, kasus Indonesia menunjukkan problem yang tak tertanggulangi dalam menemukan alternatif yang sesuai menyangkut pakta sosial lama yang terbuka pada model pertumbuhan neoliberal dan otoritarian dengan menegasikan pentingnya demokratisasi untuk mendisiplinkan akumulasi politik atas kapital.

Keempat, pengalaman Indonesia juga memperlihatkan tantangan yang menerus menyangkut politik identitas dan integrasi, yakni bagaimana mendamaikan antara universalisme dan rasa-memiliki-ke-lompok di dalam institusi-institusi dan praktik-praktik kewarganegaraan dan representasi demokratik.

Kelima, Indonesia memperlihatkan pula problem tak terpecahkan dalam membangun sebuah alternatif demokrasi sosial atas strategi perdamaian liberal. Kemajuan-kemajuan yang terjadi di Aceh pada 2005 dan 2006 digagalkan oleh lemahnya bentuk-bentuk suplementer representasi populer menuju kebebasan-kebebasan dan pemilihan yang berkualitas dangkal yang segera saja diadaptasi oleh para mantan komandan perang dan patron-patron lamanya.

Keenam, saya ingin menggaris-bawahi bahwa dilema yang sedang dihadapi para aktivis di Indonesia dewasa ini—yang secara singkat bisa diikhtisarkan sebagai tantangan untuk mewujudkan representasi demokratik yang ambisius yang dikombinasikan dengan perjuangan atas hak-hak dan kebebasan serta politik berbasis massa dan kepentingan kerakyatan—adalah dilema yang sama dengan yang dihadapi oleh para aktivis di masyarakat-masyarakat sipil lokal di banyak negara lain yang pernah mengalami transisi menuju demokrasi liberal dan pembangunan neoliberal (Harriss et al. 2004; Törnquist et al. 2009). Bahkan proyek-proyek transformatif baru yang paling berhasil sekalipun, seperti di Brazil, Kerala, Filipina, dan Afrika Selatan (lihat Heller 2013; Bull 2013; Jordhus-Lier 2013; Baiocchi, Braathen dan Teixeira 2013; Törnquist dan Tharakan 1996; Törnquist 2004; Tharakan 2004; Törnquist et al. 2009a) terus bergulat dengan problem untuk mengkombinasikan

representasi demokratis-liberal konvensional (termasuk melalui lobi dan perluasan pengaruh masyarakat sipil) dengan saluran-saluran tambahan baik yang berdasarkan representasi isu dan kepentingan, maupun untuk mengkombinasikan demokratisasi dengan pembaruan demi pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan.

Di manakah posisi kita sebaiknya dalam kasus Indonesia? Para sarjana dan praktisi telah lama terlibat dalam analisis mengenai masalah-masalah dan pilihan-pilihan demokratisasi serta politik transformatif yang ditarik dari fokus di atas dengan dua jalan keluar. Jalan keluar pertama berhubungan dengan apa yang dikatakan James Manor (2013) sebagai *post-clientelism* yang merujuk pada pengalaman lain di Asia dan Afrika. Argumen dasarnya adalah bahwa para pemimpin politik arus-utama tidak bisa lagi menyandarkan diri hanya pada klientelisme, bosisme, dan sumber finansial yang besar. Untuk memenangkan pemilihan mereka memerlukan alat-alat mobilisasi tambahan. Dengan demikian, banyak upaya ditambahkan dengan memasukkan cara-cara populis dan politik identitas. Para tokoh politik lainnya yang ingin membangun reputasi agar menjadi lebih modern dan demokratis juga mencoba membangun jaringan dengan para pemimpin dan aktivis yang bereputasi serta dengan organisasi-organisasi berbasis kepentingan kelas. Ini dilakukan untuk meraih suara ekstra. Proses ini mungkin berujung pada kooptasi para aktivis. Namun demikian terdapat juga berbagai contoh tentang munculnya para politisi progresif yang berusaha membangun politik transformatif dan membuat kemajuan-kemajuan gradual, misalnya Jokowi di kota Solo, Jawa Tengah (Pratikno dan Lay 2013) yang baru-baru ini memenangkan pemilihan sebagai Gubernur baru Jakarta. Salah satu aspek dalam kerjasama untuk tujuan ini, misalnya, bisa jadi akan berkembang menjadi tuntutan (dan sebaliknya dukungan bagi politisi yang berpengaruh) untuk menciptakan langkah-langkah preferensial pembentukan organisasi berbasis kepentingan dan inklusi demokratisnya ke dalam pemerintahan publik. Dengan demikian, menjadi mungkin untuk memfasilitasi koalisi di tingkat lokal dan sentral demi terciptanya pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kesejahteraan.

Jalan keluar kedua berhubungan dengan kebutuhan maupun tuntutan di negara-negara yang sedang mengalami industrialisasi tahap akhir (*late-industrialising countries*) seperti Brazil, India, Afrika Selatan, Nigeria, dan Indonesia untuk menciptakan skema umum ke arah provisi jaminan sosial dan santunan bagi para penganggur, maupun kesepakatan antara pemekerja dan serikat-serikat buruh menyangkut banyak isu lainnya (c.f. Beckman 2004, Chatterjee 2008, Beckman 2009, UNRISD 2010, Harriss et al. 2011, Baiocchi and Braathen 2013, Bull 2013, Harriss 2013, Jordhus Lier 2013, Stokke and Törnquist 2013). Jika demikian, menjadi mungkin untuk mengidentifikasi jalan-jalan keluar lain yang berkaitan dengan tuntutan, kebijakan-kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan. Boleh jadi ini juga akan menyebabkan peningkatan kapasitas individual para buruh dan organisasi-organisasi mereka maupun cara-cara yang diperlukan bagi agen-agen demokrasi dan pemerintah untuk memperkenalkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan kesejahteraan baru. Tujuan paling utama dari banyak aktor dominan pastilah untuk meredakan keresahan sosial, tetapi ini mungkin juga bisa dipakai sebagai cara mengambil-untung bagi aktor-aktor yang berpikir strategis untuk perubahan. Pada saat yang sama, globalisasi bukanlah sekadar perdagangan tetapi juga keuangan dan produksi yang bukan saja bisa menyebabkan ketidakmerataan pembangunan di dunia belahan Selatan namun mempengaruhi pula negara-negara industri lama dalam bentuk problem lingkungan, de-industrialisasi, dan banyak yang lainnya lagi. Karenanya pemerintahan-pemerintahan kiri-tengah yang tercerahkan di Utara mungkin bisa diharapkan melakukan tindakan tak-langsung (sesuai kepentingan mereka sendiri) untuk membangun kerjasama internasional yang menguntungkan rekanan-rekanan mereka yang berpikiran sama di Selatan dalam rangka memajukan usaha bersama untuk mendisiplinkan globalisasi (Stokke and Törnquist 2013).

Dengan adanya pelbagai jalan keluar itu, prioritas-prioritas utama apakah yang bisa dirumuskan untuk memajukan politik transformatif yang demokratis? Di Indonesia, sampai sejauh ini, perhatian terutama diberikan kepada partai yang relatif progresif atau calon-calon independen dalam pemilu (tidak ada calon independen untuk

Presiden—ed.). Partai-partai lokal juga dipikirkan sebagai titik-masuk tapi ini hanya cocok untuk Aceh—dan dengan hasil-hasil yang meragukan. Titik krusialnya adalah membentuk blok-blok sosial politik dalam hubungannya dengan calon-calon independen dan partai-partai progresif itu. Dalam rangka merebut suara dan menjangkau klien, ada kebutuhan untuk menanggulangi fragmentasi di antara berbagai organisasi masyarakat sipil, gerakan sosial, dan kelompok-kelompok politik dengan mempromosikan organisasi di tingkat menengah-antara (*intermediate*)—yaitu “di atas” organisasi-organisasi masyarakat sipil yang secara tipikal berorientasi isu-spesifik, organisasi-organisasi kerakyatan, dan gerakan sosial, serta “di bawah” inisiatif-inisiatif politik kepartaian yang berwatak *top-down*. Bisa jadi akan ada tuntutan gabungan pada tingkat ini untuk pengaturan-pengaturan institusional “dari atas” yang akan menciptakan pilihan lebih baik bagi representasi kerakyatan sambil menstimulasi munculnya organisasi yang lebih besar dan aksi bersama yang lebih luas di antara warga negara dan organisasi-organisasi kerakyatan. Partai-partai dan calon-calon independen maupun organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kerakyatan dipastikan akan tetap ingin membentuk dan mendominasi kelompok-kelompok pendukungnya sendiri, juga berbagai gerakan dan organisasi koalisi mereka. Tetapi jalan-jalan pintas seperti ini dipastikan gagal menghasilkan mayoritas yang cukup pada pemilu/pemilukada jika ruang lingkungannya terlalu sempit dan partisan. Para politisi dan kelompok-kelompok pendukungnya yang sungguh-sungguh ingin membuat perbedaan dengan memenangkan mandat rakyat harus memihak blok-blok sosial-politik inklusif yang memiliki derajat independensi meyakinkan baik di pihak politisi maupun di pihak organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kerakyatan. Blok-blok inklusif itu bisa dibentuk oleh satuan-satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dengan kapasitas operasional yang cukup untuk membuat mereka terpisah dari, tetapi tetap dipercaya oleh, para politisi serta kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang saling berpencaran.

Untuk memenangkan momentum dan bertindak sesuai platform sebagai agen perubahan, blok-blok sosial politik itu harus melampaui dukungan tokoh-tokoh partikular dengan menekankan prinsip-prinsip

dasar demokrasi dan kebijakan-kebijakan pembangunan transformatif untuk pemajuan kesejahteraan. Prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga demokratis diperlukan untuk melahirkan kepercayaan pada kerjasama, juga untuk mencegah pencaplokan elite, serta memungkinkan blok-blok tersebut melawan penyalahgunaan kekuasaan. Sebuah fokus pada kebijakan kesejahteraan akan diperlukan untuk memperkuat kapasitas sosial dan politik rakyat serta organisasi-organisasi mereka, begitupun bagi pengaturan urusan publik. Dengan adanya pengalaman komparatif dari kasus-kasus yang lebih sukses (Stokke dan Törnquist 2013), maka penciptaan saluran-saluran pelengkap demokratis untuk representasi berbasis isu dan kepentingan tampaknya sangat fundamental dalam rangka mendukung pertumbuhan organisasi dan gerakan populer yang meluas.

Demikianlah, pengalaman-pengalaman komparatif itu menegaskan bahwa berbagai macam keuntungan itu harus dibagi seluas mungkin lebih ketimbang hanya bagi kelompok sasaran tertentu. Ini adalah dalam rangka memungkinkan pencakupan dan dukungan yang luas di luar kepentingan-kepentingan dan kelompok-kelompok khusus. Akhirnya, lima wilayah kebijakan tampaknya sangat kritis dalam konteks Indonesia: kebijakan kesejahteraan yang (seperti misalnya di Brazil dan Skandinavia) lebih menyumbang daripada menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, transparansi dan anti-korupsi, kesetaraan gender, serta pendidikan yang lebih demokratis dan diskursus publik.

Referensi

- Aspinall, E. (2005) *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (Stanford: Stanford University Press).
- Aspinall, E. (2010) ‘The Irony of Success’ in *Journal of Democracy*, 21(2) April.
- Baiocchi, G., Braathen, E. and Teixeira, A-C. (2013), ‘Transformation Institutionalised? Making Sense of Participatory Democracy in the Lula Era’. In Stokke, K. and Törnquist, O. (Eds.) *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Basingstoke: Palgrave

- Beckman, B. (2004). 'Trade Unions, Institutional Reform and Democracy: Nigerian Experiences with South African and Ugandan Comparisons'. In J. Harriss, K. Stokke, and O. Törnquist (eds.) *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*. Basingstoke: Palgrave.
- Beckman, B. (2009). 'Trade Unions and Popular Representation: Nigeria and South Africa Compared'. In Törnquist, O, Webster, N, and Stokke, K. (Eds.) (2009). *Rethinking Popular Representation*, New York: Palgrave.
- Bourchier, D. and Legge J. (eds) (1994) *Democracy in Indonesia. 1950s and 1990s*. (Clayton: Monash Asia Institute).
- Budiman, A. and Törnquist, O. (2001) *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia* (Jakarta: ISAI).
- Bull, B. (2013) "Social Movements and the 'Pink Tide' Governments in Latin America: Transformation, Inclusion and Rejection", In Stokke, K. and Törnquist, O. (Eds.) *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Basingstoke: Palgrave
- Carothers, T. (2007) "How Democracies Emerge. The "Sequencing" Fallacy" in *Journal of Democracy*, 18(1):12-27.
- Chatterjee, P. (2008). 'Democracy and Economic Transformation', in *Economic and Political Weekly*, April 19.
- Harriss, J. (2013) 'Transformative Democratic Politics in Liberalising India', Stokke, K. and Törnquist, O. (Eds.) *Democratisation in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Basingstoke: Palgrave
- Harriss, J. (2011). 'Have India's economic reforms been "guided by compassion and justice?"', in Sanjay Ruparelia, Sanjay Reddy, John Harriss and Stuart Corbridge (Eds.), *Understanding India's New Political Economy: A Great Transformation?* (London: Routledge).
- Harriss, J., Stokke, K. and Törnquist, O.(eds) (2004) *Politicising democracy. The new local politics of democratisation* (Houndmills: Palgrave).
- Heller, P. (2013) 'Participation and democratic transformation: Building effective citizenship in Brazil, India and South Africa' in in Stokke, K. and Törnquist, O. (Eds.) *Democratisation in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Basingstoke: Palgrave.
- Huntington, S. (1965) "Political development and political decay" in *World Politics*, 17(3).
- Jordhus-Lier, D.C. (2013) "Trade Unions and Democratisation: Representation and Engagement during Local Government Reform in South Africa". In Stokke, K. and Törnquist, O. (Eds.) *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Basingstoke: Palgrave.
- Klinken, van, G. (2009). 'Patronage democracy in provincial Indonesia' in Törnquist, O., Webster, N. and Stokke, K. (eds) (2009) *Rethinking popular representation* (New York: Palgrave).
- Lane, M. (2008) *Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto* (London and New York: Verso).
- Manor, J. (2013). 'Post-Clientelist Initiatives'. In Törnquist, O, Webster, N, and Stokke, K. (2009). *Rethinking Popular Representation*, New York: Palgrave.
- Nordholt, H. S. and G. van Klinken (eds) (2007) *Renegotiating boundaries* (Leiden: KITLV Press).
- Prasetyo, A. S., Priyono, AE and Törnquist, O. with Birks, T. (eds) (2003) *Indonesia's Post-Suharto Democracy Movement* (Jakarta and Copenhagen: Demos and NIAS).
- Pratikno and Lay, C. (2013). 'From Populism to Democratic Polity. Problems and Challenges in Surakarta, Indonesia', in Stokke, K. and Törnquist, O. (Eds.) *Democratisation in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Basingstoke: Palgrave.
- Priyono, AE, Samadhi, W.P. and Törnquist, O. with Birks, T. (eds) (2007) *Making Democracy Meaningful. Problems and Options in Indonesia* (Jakarta and Singapore: Demos and ISEAS).
- Robison, R. and Hadiz, V.R. (2004) *Reorganising Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge Curzon).

- Roosa, J. (2006) *Pretext for mass murder. The September 30th Movement and Suharto's coup d'état in Indonesia* (Wisconsin: The University of Wisconsin Press).
- Samadhi, W. P. and Warouw, N. (eds) (2009) *Building Democracy on the Sand. Advances and Setbacks in Indonesia* (Jakarta, Jogjakarta and Singapore: Demos, PCD Press, ISEAS (second edition 2009).
- Stokke, K. and Törnquist, O. (2013) 'Transformative democratic politics' and 'The relevance of the Scandinavian experiences' in Stokke, K. and Törnquist, O. (Eds.) *Democratisation in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Basingstoke: Palgrave.
- Tharakan, P. K. M. (2004) 'Historical hurdles in the course of the people's planning campaign in Kerala' in Harriss, J., Stokke, K. and Törnquist, O. (eds) *Politicising democracy. The new local politics of democratisation* (Houndmills: Palgrave).
- Törnquist, O. (1984) *Dilemmas of Third World Communism. The Destruction of the PKI in Indonesia* (London: Zed Books) (First published in Swedish 1982).
- Törnquist, O. (1984a) *Struggle for Democracy -- a New Option in Indonesia?* The Akut-series no. 33. Uppsala University.
- Törnquist, O. (1997) 'Civil Society and Divisive Politicisation: Experiences from Popular Efforts at Democratisation in Indonesia' in Özdalga, E.; Persson, S. (eds): *Civil Society, Democracy and the Muslim World* (Istanbul: Swedish Research Institute & Curzon Press).
- Törnquist, O. (2000) 'Dynamics of the Indonesian Democratisation' in *Third World Quarterly*, 21(3) also in *Economic and Political Weekly*, April 29.
- Törnquist, O. (2004) 'The political deficit of substantial democratisation' in Harriss, J., Stokke, K. and Törnquist, O. (eds) *Politicising democracy. The new local politics of democratisation* (Houndmills: Palgrave).
- Törnquist, O. (2013) "Aceh: Verandah of Lost Opportunities," in Avonius, L, Vignato, S, and Grayman, J. (2013), *Building Peace in Aceh: Politics, Reintegration and Communities* (forthcoming)
- Törnquist, O. (2013a) *Assessing the Dynamics of Democratisation. Transformative Politics, New Institutions and the Case of Indonesia*. New York: Palgrave (forthcoming)
- Törnquist, O. with Tharakan, P. K. M. (1996) 'Democratisation and the radical political project in Kerala' in *Economic and Political Weekly* 31(28, 29, 30).
- Törnquist, O., Prasetyo S.A. and Birks T. (eds) (2011) *Aceh: The role of democracy for peace and reconstruction*, 2nd ed. (Yogyakarta and Singapore: PCD Press with ISEAS) (2nd edition with update).
- Törnquist, O., Tharakan, P.K.M. (with Chathukulam, J.) and Quimpo, N. (2009a). 'Popular politics of representation: New lessons from the pioneering projects in Indonesia, Kerala, and the Philippines', in Törnquist, O., Webster, N. and Stokke, K. *Rethinking Popular Representation* (New York: Palgrave).
- Törnquist, O., Webster, N. and Stokke, K. (2009) *Rethinking Popular Representation* (New York: Palgrave).
- UNRISD (2010), *Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics*, Geneva.